

TAK TERSENTUH HUKUM Hercules Polisikan Mantan Pengacara



HERCULES

Jakarta, HanTer - Tim kuasa hukum Hercules akan melaporkan Sofyan Sutepu yang merupakan mantan pengacara Hercules, ke polisi karena telah memberikan penjelasan yang sesat.

"Hercules hanya datang untuk pemasangan plang atas perintah yang diberikan oleh Sofyan Sutepu," ujar salah satu pengacara Hercules, Anshori Thoyib di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019).

Anshori juga mengatakan bahwa Sofyan Sutepu telah memberikan penjelasan sesat kepada Hercules, ahli waris, dan rekan-rekan lainnya.

"Putusan PK no 90 ini tidak mempunyai kekuasaan ekstrateritorial harusnya Sofyan menjelaskan bahwa tidak boleh masuk sembarangan, cuman dia bilang boleh masuk sebagai bukti kepemilikan dan pasang plang," ujar Anshori.

Anshori juga menjelaskan, Hercules tidak melakukan tindakan kekerasan, namun hanya melihat pemasangan plang berdasarkan perintah Sofyan.

"Kami akan laporkan Sofyan Sutepu," ujar Anshori

Divonis Delapan Bulan Penjara

Sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Hercules Rosario Marshal delapan bulan penjara karena dinilai terbukti bersalah memasuki pekarangan PT Nila Alam tanpa seizin pemiliknya.

"Menjatuhkan pidana terhadap Hercules Rosario Marshal alias Hercules dengan pidana penjara selama 8 bulan. Dengan dikurangi seluruhnya masa tahanan yang dijalani," ujar Ketua Majelis Hakim Rustiyono di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019).

Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai Hercules terbukti melanggar Pasal 167 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yakni memasuki pekarangan milik orang lain, dalam kasus ini yakni lahan PT Nila Alam tanpa izin.

Pasal tersebut sesuai dengan dakwaan ketiga yang diberikan JPU terhadap Hercules dalam kasus ini.

Hukuman terhadap Hercules ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan JPU yang menuntut Hercules pidana tiga tahun penjara. Sebelumnya, Hercules dituntut 3 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam tuntutan JPU, Hercules dianggap melanggar Pasal 170 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat ke (1) KUHP, yakni melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan terang-terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang terkait pemasangan plang dan penguasaan kantor pemasaran PT Nila Alam.

Terkait hasil putusan ini, baik Hercules dan tim kuasa hukumnya maupun JPU masih akan pikir-pikir sebelum melakukan banding.

Kendati demikian, raut muka Hercules terlihat lebih ceria dan sempat melampirkan senyum kepada pendukungnya yang memenuhi ruang sidang.

Sementara itu, para pendukung Hercules juga tampak senang dengan vonis tersebut.

■ Danial

KASUS SUAP JUAL BELI JABATAN

KPK BIDIK MENAG LUKMAN HAKIM



LAODE M SYARIF

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin untuk diperiksa terkait uang yang disita dari ruang kerjanya.

Jakarta, HanTer - Info beredar Lukman Hakim kini dalam bidikan KPK untuk ditetapkan tersangka baru karena diduga menerima aliran dana terkait mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan Kemenag, yang sudah menjerat tiga orang tersangka.

Apalagi, saat tim KPK mengeledah ruang kerjanya, KPK menemukan uang pecahan rupiah senilai Rp180 juta dan 30 ribu dolar Amerika. Pengeledahan ruangan Menag dilakukan setelah KPK menangkap tangan mantan Ketua Umum PPP versi Muktamar Pondokgede, Romahurmuziy alias Romy.

"Semua uang yang kita sita pasti diklarifikasi. Beliau (Lukman) kan belum diperiksa. Nanti setelah diperiksa, kita mengetahui apakah itu honor atau uang kas atau uang yang berhubungan dengan hal-hal yang lain," ujar Wakil Ketua KPK Laode M

“
Semua uang yang kita sita pasti diklarifikasi. Beliau (Lukman) kan belum diperiksa. Nanti setelah diperiksa, kita mengetahui apakah itu honor atau uang kas atau uang yang berhubungan dengan hal-hal yang lain

Laode M Syarif

Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Syarif menolak berspekulasi mengenai keterlibatan Lukman dalam pusaran kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yang telah menjerat tiga orang tersangka tersebut.

Namun Syarif menegaskan, bila dalam kasus suap jual beli jabatan dipastikan ada peran orang-orang di luar tiga tersangka yang saat ini telah mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK. "Yang bisa saya sampaikan bahwa laporan yang



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

kami terima itu tidak terbatas kepada yang ditangkap pada saat tertangkap tangan. Kami juga mendapatkan laporan hampir sama dari beberapa daerah lain," jelasnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka pada kasus ini, yaitu diduga sebagai penerima suap adalah anggota DPR periode 2014-2019 M Romahurmuziy alias Romy. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyup Romy untuk mengurus pro-

ses lolos seleksi jabatan di Kemenag.

Diketahui, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Atas perbuatannya, dua tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara Romy, tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

■ Safari



PT AIRASIA INDONESIA Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN				LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN		
Tanggal 31 Desember 2018					Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018				Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018		
(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)					(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)				(Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)		
ASET	31 Des 2018	31 Des 2017	LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Des 2018	31 Des 2017	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember	
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK			2018	2017	2018	2017	2018	2017
Kas dan bank	140.409.140.360	248.423.113.666	Utang usaha - pihak ketiga	528.141.321.221	248.917.186.650	4.232.768.047.707	3.817.860.941.246	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		4.497.969.564.436	3.755.000.948.321
Piutang usaha - pihak ketiga	62.763.959.834	22.985.357.253	Utang lain-lain - pihak berelasi	851.646.273.801	658.517.798.850			Penerimaan kas dari pelanggan			
Piutang lain-lain			Utang pajak	46.104.689.924	50.250.989.779			Pengeluaran kas kepada pemasok			
Pihak berelasi	108.025.068.231	167.125.046.173	Pendapatan diterima di muka	724.485.382.758	496.036.129.375			karyawan dan untuk beban usaha	(4.534.205.776.973)	(3.167.585.694.286)	
Pihak ketiga	23.545.751.941	26.742.967.804	Utang muka diterima	756.099.000	677.950.000			Pembayaran pajak penghasilan	(8.928.032.457)	(106.527.885.054)	
Perseediaan, neto	65.565.414.367	40.730.641.991	Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Pembayaran bunga dan beban keuangan	(80.016.586.285)	(78.207.695.118)	
Uang muka dan biaya dibayar di muka	59.533.103.105	61.320.285.068	Pinjaman bank	103.146.693.975	-			Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(125.180.831.279)	402.679.673.863	
Total Aset Lancar	459.842.437.838	567.327.411.955	Sewa pembiayaan	283.300.158.175	494.147.322.689			ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		735.850.428.947	1.061.026.453

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN										
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)										
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Akumulasi Rugi	Sekuritas Perpetual	Penghasilan Komprehensif Lainnya			Ekuitas yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non-pengendali	Total Ekuitas (Defisiensi Modal), Neto
					Labas (Rugi) Pengukuran Kembali atas Liabilitas Kerja Karyawan	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Total			
Saldo per 1 Januari 2017	54.000.000.000	126.000.000.000	(4.866.964.982.584)	5.100.000.000.000	(1.105.674.484)	-	(1.105.674.484)	411.929.342.932	4.917.000.000	416.846.342.932
Rugi tahun berjalan	-	-	(512.643.243.578)	-	-	-	-	(512.643.243.578)	(318.036.805)	(830.680.053)
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	-	-	-	-	(4.295.814.464)	-	(4.295.814.464)	(4.295.814.464)	13.658.111	(4.282.156.353)
Selisih revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	83.516.850.734	83.516.850.734	83.516.850.734	-	83.516.850.734
Imbalan yang secara efektif dialihkan dalam akuisisi terbalik	-	51.840.000.000	-	-	-	-	-	51.840.000.000	-	51.840.000.000
Penerbitan saham baru untuk bagian publik	16.281.110.250	-	-	-	-	-	-	16.281.110.250	-	16.281.110.250
Konversi sekuritas perpetual menjadi saham	2.601.000.000.000	-	-	(2.601.000.000.000)	-	-	-	-	-	-
Biaya emisi saham penawaran umum terbatas	-	(14.166.004.500)	-	-	-	-	-	(14.166.004.500)	-	(14.166.004.500)
Saldo per 31 Desember 2017	2.671.281.110.250	163.673.995.500	(5.379.608.226.162)	2.499.000.000.000	(5.401.488.948)	83.516.850.734	78.115.361.786	32.462.241.374	4.612.621.306	37.074.862.680
Rugi tahun berjalan	-	-	(907.290.672.982)	-	-	-	-	(907.290.672.982)	265.839.274	(907.024.833.708)
Rugi komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	-	-	-	-	24.574.222.152	-	24.574.222.152	24.574.222.152	18.210.814	24.592.432.966
Selisih revaluasi aset tetap	-	-	-	-	-	33.023.746.082	33.023.746.082	33.023.746.082	-	33.023.746.082
Reklasifikasi langsung selisih revaluasi akibat penjualan aset tetap	-	-	40.633.730.515	-	-	(30.475.297.889)	(30.475.297.889)	10.158.432.626	-	10.158.432.626
Saldo per 31 Desember 2018	2.671.281.110.250	163.673.995.500	(6.246.265.168.029)	2.499.000.000.000	19.172.733.204	86.065.298.927	105.238.032.131	(807.072.030.748)	4.896.671.394	(802.175.359.354)

Catatan :
Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian PT AirAsia Indonesia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini audit tanpa modifikasi, sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 8 Maret 2019 yang tidak dilampirkan dalam publikasi ini. Informasi keuangan tersebut di atas tidak mencakup catatan atas laporan keuangan konsolidasian."

Jakarta, 28 Maret 2019

PT AIRASIA INDONESIA Tbk

Direksi